

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Kinerja Keuangan Perusahaan

Kinerja keuangan perusahaan menggambarkan tentang kondisi keuangan dalam suatu perusahaan yang dilihat dengan menggunakan berbagai alat analisis keuangan, dengan begitu dapat dilihat baik tidaknya kondisi keuangan dalam perusahaan yang dapat mencerminkan prestasi kerja periode tertentu (Melawati, Nurlaela, & Wahyuningsih, 2016). Salah satu sumber informasi yang dapat menggambarkan kinerja yang telah dicapai suatu perusahaan pada waktu tertentu ialah laporan. Laporan keuangan perusahaan bertujuan meringkaskan kegiatan dan hasil dari kegiatan tersebut untuk jangka waktu tertentu. Menurut Hanafi (2013) ada lima jenis rasio keuangan yang sering digunakan:

1) Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas mengukur kemampuan likuiditas jangka pendek perusahaan dengan melihat besarnya aktiva lancar relatif terhadap utang lancarnya. Utang dalam hal ini kewajiban perusahaan. Ada beberapa rasio likuiditas yaitu rasio lancar dan rasio *quick*.

2) Rasio Aktivitas (efisiensi)

Rasio ini melihat seberapa efisiensi penggunaan aset oleh perusahaan. Rasio ini melihat seberapa besar dana yang tertanam pada aset perusahaan. Jika dana yang ditanam pada aset tertentu cukup besar,

maka sementara dana tersebut misalnya bias dipakai untuk investasi pada asset lain yang lebih produktif maka profitabilitas tidak sebaik yang seharusnya. Ada beberapa rasio aktivitas yaitu rata-rata umur piutang, perputaran persediaan, perputaran aktifa tetap dan perputaran total aktiva.

3) Rasio utang/*Solvabilitas/Lavarage*

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Perusahaan yang tidak *solvable* adalah perusahaan yang total utangnya lebih besar dibandingkan dengan total asetnya. Rasio ini memfokuskan pada sisi kanan kewajiban perusahaan. Ada berapa macam rasio *leverage* yang dapat dihitung , yaitu rasio utang terhadap *total asset*, rasio *times interest earned*, rasio *fixed charge coverage*.

4) Rasio Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan profit atau laba dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Profitabilitas adalah ukuran yang sering digunakan oleh investor untuk menilai tingkat keberhasilan suatu perusahaan dalam menjalankan bisnisnya, sehingga profitabilitas bisa dikatakan sebagai salah satu faktor yang menjadi pertimbangan investor untuk melakukan investasi pada sebuah perusahaan. Ada tiga rasio yang biasanya digunakan, yaitu *profit margin*, *Return On Asset (ROA)*, dan *Return On Equity (ROE)*

Profit magin menghitung sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan tertentu. *Profit magin* dapat dihitung sebagai berikut (Hanafi, 2013).

$$\textit{Profit Margin} = \frac{\textit{Laba Bersih}}{\textit{Penjualan}}$$

Return On Asset (ROA) mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang tinggi pada tingkat penjualan tertentu. Rasio tersebut bisa dihitung sebagai berikut ini.

$$\textit{Return On Asset} = \frac{\textit{Laba Bersih}}{\textit{Total Aset}}$$

Return On Equity (ROE) mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan modal tertentu. Rasio ROE bias dihitung sebagai berikut.

$$\textit{Return On Equity} = \frac{\textit{Laba Bersih}}{\textit{Modal Saham}}$$

5) Rasio Pasar

Rasio pasar digunakan untuk mengukur harga pasar relatif terhadap nilai bakunya. Sudut pandang resiko ini lebih banyak berdasarkan pada sudut pandang investor atau calon investor, meskipun pihak manajemen juga berkempeningan terhadap rasio-rasio ini. Rasio pasar dapat diukur dengan *Price earning ratio* (PER), *dividend yield*, dan pembayaran dividen (*divident payout*).

2. Teori keagenan (Agency Theory)

Menurut Jensen & Meckling (1976) menyatakan konsep keagenan yaitu sebuah kontrak yang dimana *principal* menyewa agen untuk melakukan kontribusi bagi kepentingan mereka dengan memberikan beberapa wewenang pembuatan keputusan kepada agen.

Berbagai pemikiran mengenai GCG berkembang sekaligus mengacu pada *agency theory* dimana tata kelola perusahaan harus diawasi dan dikendalikan untuk memastikan bahwa tata kelola tersebut dilakukan dengan kepatuhan kepada peraturan dan ketentuan yang berlaku (Solihin, 2008). Hal ini menunjukkan bahwa manajer tidak selamanya bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik perusahaan, di sisi lain sering pula terjadi para manajer bertindak untuk mengejar kepentingan mereka sendiri yang lebih menguntungkan (Ramdhaningsih & Utama, 2013)

3. Teori Legitimasi

Teori legitimasi Teori legitimasi menjelaskan bahwa perusahaan beroperasi dalam lingkungan eksternal yang berubah secara konstan dan mereka berusaha meyakinkan bahwa perilaku mereka sesuai dengan batas-batas dan norma masyarakat (Deegan, Rankin, & Tobin, 2002). Dalam keadaan psikologis legitimasi merupakan kondisi dimana individu atau kelompok yang mempunyai kepekaan terhadap gejala lingkungan secara fisik ataupun dengan nonfisik (Hadi, 2011). Deegan, Rankin, & Tobin (2002) menjelaskan bahwa dalam lingkungan masyarakat dan juga perusahaan mempunyai kesesuaian dan perusahaan tidak mengganggu atau sesuai dengan eksistensi sistem nilai yang berada dalam lingkup masyarakat dan lingkungan sekitarnya disebut dengan legitimasi. Saat adanya pergeseran yang membuat ketidaksesuaian, maka legitimasi perusahaan akan terancam.

Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan adalah salah satu mekanisme atau sistem yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara

perusahaan dengan *stakeholder*. Dalam penelitian ini Teori legitimasi mengimplikasikan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan bertujuan untuk memperoleh pengakuan legitimasi dari masyarakat. Dengan perusahaan mengungkapkan informasi tentang *Corporate social Responsibility* merupakan salah satu investasi jangka panjang yang dimiliki perusahaan karena dapat meningkatkan image dan legitimasi perusahaan, maka dapat dijadikan salah satu strategi bisnis perusahaan.

4. *Good Corporate Governance (GCG)*

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI, 2001)* *corporate governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.

Corporate governance merupakan suatu mekanisme pengelolaan yang didasarkan pada teori keagenan. Penerapan konsep *corporate governance* diharapkan memberikan kepercayaan terhadap agen (manajemen) dalam mengelola kekayaan pemilik (investor), dan pemilik menjadi lebih yakin bahwa agen tidak akan melakukan suatu kecurangan untuk kesejahteraan agen (Darwis, 2009).

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan variabel Dewan Direksi dan Dewan Komisaris dalam Peungkapan *Good Corporate Governance*.

a. Dewan Direksi

Menurut UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Perusahaan Publik Pasal 1 Direksi adalah organ Emiten atau Perusahaan Publik yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Emiten atau Perusahaan Publik untuk kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik, sesuai dengan maksud dan tujuan Emiten atau Perusahaan Publik serta mewakili Emiten atau Perusahaan Publik, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Direksi sebagai organ Perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara kolegal. Masing-masing anggota Direksi dapat melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya. Pelaksanaan tugas dari masing-masing anggota Direksi tetap merupakan tanggung jawab bersama. Kedudukan masing-masing anggota Direksi, termasuk Direktur Utama adalah setara. Tugas Direktur Utama sebagai *primus inter pares* adalah mengkoordinasikan kegiatan Direksi. Fungsi pengelolaan Perusahaan oleh Direksi mencakup 9 (sembilan) tugas-tugas utama yaitu kepengurusan, manajemen risiko, pengendalian internal, komunikasi, aktuaría, investasi, pemasaran, teknologi informasi (TI) serta tanggung jawab sosia (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2018)

Melawati, Nurlaela, & Wahyuningsih (2016) menyatakan Dewan Direksi merupakan pihak dalam suatu entitas perusahaan yang bertugas melakukan melaksanakan operasi dan kepengurusan perusahaan. Dengan begitu Dewan

direksi mempunyai tanggung jawab penuh atas segala bentuk operasional dan kepengurusan perusahaan dalam pencapaian tujuan perusahaan.

b. Dewan Komisaris

Menurut UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Perusahaan Publik Pasal 1 Dewan Komisaris adalah organ Emiten atau Perusahaan Publik yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direks.

Dewan Komisaris adalah organ Perusahaan yang melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, dan memberi nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa Perusahaan melaksanakan GCG. Namun demikian, Dewan Komisaris tidak boleh turut serta dalam pengambilan keputusan operasional. Kedudukan masing-masing anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Utama adalah setara, dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris secara 21 kolektif.

5. *Corporate Social Responsibility (CSR)*

Corporate Social Responsibility atau pertanggungjawaban sosial perusahaan didefinisikan sebagai aksi yang muncul sebagai lanjutan dari tindakan sosial, di luar kepentingan perusahaan dan yang diwajibkan oleh hukum (Agustine, 2014). CSR merupakan suatu pengembangan konsep yang dikemukakan oleh John Elkington dalam Agustine (2014) yaitu “*The Triple Bottom Line (3P)*”. Dalam konsep tersebut dinyatakan bahwa agar perusahaan dapat mempertahankan keberlangsungannya maka perlu memperhatikan 3P,

yakni tidak hanya profit, namun juga mampu memberikan kontribusi kepada masyarakat (people) serta ikut aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (planet). Contoh dari bentuk tanggung jawab tersebut bermacam-macam, mulai dari melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemberian dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, dan lain sebagainya. Menurut Elipstein dan Freedman dalam Candrayanthi & Saputra (2013) menyatakan informasi sosial yang dilaporkan dalam laporan keuangan tahunan merupakan daya tarik bagi investor individual. Laporan pertanggungjawaban sosial perusahaan dingakapkan oleh perusahaan dengan menggunakan sarana laporan keuangan.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no. 47 tahun 2012 tentang tanggung jawaban social dan lingkungan persero terbatas, tanggung jawab social dan lingkungan tersebut diatur mengenai 1. Tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang. 2. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dilakukan di dalam ataupun di luar lingkungan Perseroan. 3. Tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan berdasarkan rencana kerja tahunan yang memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaannya. 4. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan disusun dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. 5. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan wajib dimuat dalam laporan tahunan Perseroan untuk dipertanggungjawabkan

kepada RUPS. 6. Penegasan pengaturan pengenaan sanksi Perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. 7. Perseroan yang telah berperan dan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dapat diberikan penghargaan oleh instansi yang berwenang.

6. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan salah satu variabel penting dalam pengelolaan perusahaan. Othman *et al.* (2009) Ukuran perusahaan merupakan salah satu indikasi keberhasilan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya, semakin baik perusahaan dalam mengelola bisnisnya maka perusahaan tersebut akan mengalami pertumbuhan dalam bisnisnya, hal inilah yang dimaksud ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan mencerminkan seberapa besar asset total yang dimiliki perusahaan, *total asset* yang dimiliki perusahaan menggambarkan permodalan, serta hak dan kewajiban yang dimilikinya. Semakin besar ukuran perusahaan, dapat dipastikan semakin besar juga dana yang dikelola dan semakin kompleks pula pengelolaannya (Melawati, Nurlaela, & Wahyuningsih, 2016). Sehingga ukuran perusahaan akan berpengaruh terhadap akses perusahaan dalam memperoleh sumber pendanaan. Perusahaan besar cenderung mendapat perhatian lebih dari masyarakat luas. Dengan demikian, biasanya perusahaan besar memiliki kecenderungan untuk selalu menjaga stabilitas dan kondisi perusahaan. Untuk menjaga stabilitas dan kondisi ini, perusahaan tentu saja akan berusaha mempertahankan dan terus meningkatkan kinerjanya.

Secara teori ukuran perusahaan yang meningkat akan menaikkan kinerja keuangan perusahaan. Temuan penelitian ini mendukung teori critical resources oleh Kumar, Rajan dan Zingales (2001), semakin besar skala perusahaan maka profitabilitas juga akan meningkat karena perusahaan besar mampu mencapai skala ekonomis, sehingga perusahaan memiliki keuntungan dari adanya pengurangan biaya produksi yang terjadi ketika perusahaan memproduksi dalam jumlah besar dengan menggunakan sumber daya yang sama. Ukuran perusahaan mempengaruhi laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Peningkatan pada jumlah aset yang dimiliki perusahaan menunjukkan semakin bertambah ukuran perusahaan tersebut, sehingga perusahaan dengan ukuran yang besar dan go public mempunyai akses yang besar ke sumber-sumber dana baik ke pasar modal maupun perbankan untuk membiayai investasinya dalam rangka meningkatkan labanya. Perusahaan besar memiliki fleksibilitas lebih besar untuk memperoleh dana yang sangat diperlukan untuk melaksanakan kesempatan investasi yang menguntungkan. Dengan demikian, kesempatan untuk meningkatkan keuangan perusahaan pada perusahaan besar lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan kecil. Menurut Liargovas & Skandalis (2008) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan merupakan suatu pertimbangan investasi penting bagi investor dalam membeli saham. Bagi investor, ukuran perusahaan dijadikan patokan bahwa perusahaan tersebut mempunyai kinerja yang bagus.

7. Kebijakan Pendanaan

Dalam menjalankan usahanya, setiap perusahaan tentu memerlukan modal yang kuat untuk membiayai kegiatan-kegiatan perusahaan. Menurut sifatnya ada dua tipe pendanaan yaitu pendanaan dari dalam dan pendanaan dari luar. Pendanaan dari luar bisa berupa pinjaman, baik pinjaman jangka pendek maupun pinjaman jangka panjang, dan juga dengan menjual surat berharga (*go public*) kepada masyarakat melalui pasar modal (Barclay & Smith, 2005).

Manajer harus mampu menghimpun dana baik yang bersumber dari dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan secara efisien, dalam arti keputusan pendanaan tersebut merupakan keputusan pendanaan yang mampu meminimalkan biaya modal yang harus ditanggung perusahaan (Indriani & Widyarti, 2013) . Biaya modal yang timbul dari keputusan pendanaan tersebut merupakan konsekuensi yang secara langsung timbul dari keputusan yang dilakukan manajer. Ketika manajer menggunakan hutang maka biaya modal yang timbul sebesar biaya bunga yang dibebankan oleh kreditur sedangkan jika manajer menggunakan dana internal atau dana sendiri akan timbul *opportunity cost* dari dana atau modal sendiri yang digunakan. Keputusan pendanaan yang dilakukan secara tidak cermat akan menimbulkan biaya tetap dalam bentuk biaya modal yang tinggi, yang selanjutnya akan berakibat pada rendahnya profitabilitas perusahaan. Berkaitan dengan hal tersebut maka perusahaan perlu memperhatikan biaya modal yang efisien dalam menentukan pendanaan di dalam perusahaan yang optimal.

Perusahaan harus mencari berbagai alternatif pendanaan yang efisien dalam memenuhi kebutuhan dananya.

Pendekatan Modigliani dan Miller dengan pajak dalam (Hanafi, 2013) menyatakan bahwa keuangan dalam suatu perusahaan akan meningkat apabila perusahaan menggunakan sumber pendanaan yang berasal dari utang, meningkatnya keuangan perusahaan dikarenakan adanya penghematan pajak dari penggunaan utang. Apabila semakin banyak pendapatan perusahaan maka semakin banyak pajak yang harus ditanggung perusahaan dan apabila pendapatan perusahaan sedikit maka akan sedikit juga pajak yang ditanggung perusahaan. Keputusan berhutang membuat perusahaan membuat perusahaan harus membagi pendapatannya untuk beban pajak dan bunga. Dengan demikian, perusahaan yang memiliki tingkat hutang yang tinggi lebih memilih menggunakan pendapatannya untuk membayar bunga hutang. Berkurangnya pendapatan setelah beban bunga secara tidak langsung akan mengurangi pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Adanya aliran kas keluar untuk membayar pajak menjadi sedikit dan secara tidak langsung akan membuat profitabilitas perusahaan meningkat, meningkatnya profitabilitas perusahaan akan menarik investor untuk berinvestasi terhadap perusahaan. Banyaknya investor yang tertarik untuk berinvestasi terhadap perusahaan akan berdampak pada meningkatnya kinerja keuangan perusahaan.

Kebijakan pendanaan menggunakan Rasio Leverage Menurut Hanafi (2013) Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Perusahaan yang tidak solvable adalah perusahaan yang

total utangnya lebih besar dibandingkan dengan total asetnya. Rasio ini memfokuskan pada sisi kanan kewajiban perusahaan. Perlu ditegaskan kembali bahwa *leverage* dalam pengertian bisnis mengacu pada penggunaan asset dan sumber dana (*sources of funds*) oleh perusahaan dimana dalam penggunaan asset atau dana tersebut perusahaan harus mengeluarkan biaya tetap atau beban tetap, penggunaan asset (aktiva) atau dana tersebut pada akhirnya dimaksudkan untuk meningkatkan keuntungan potensial bagi pemegang saham. Dalam suatu perusahaan dikenal dua macam *leverage*, yaitu *leverage operasi (operating leverage)* dan *leverage keuangan (financial leverage)*, penggunaan kedua *leverage* ini dengan tujuan agar keuntungan yang diperoleh lebih besar daripada biaya asset dan sumber dananya (Martono & Harjito, 2001).

Kebijakan pendanaan dapat diukur dengan menggunakan rumus *debt to equity ratio*. Menurut Kasmir (2008), Debt to Equity Ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi total kewajibannya dengan menggunakan modal sendiri perusahaan, sehingga rasio ini berfungsi untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri perusahaan yang dijadikan sebagai jaminan utang. Semakin besar rasio ini semakin tidak menguntungkan bagi para kreditur karena jaminan modal pemilik terhadap modal semakin kecil. Debt to equity ratio berguna untuk mengetahui jumlah yang akan disediakan kreditur kepada perusahaan. Dari segi kreditur, jika rasio semakin besar semakin tidak menguntungkan karena semakin besar

risiko yang ditanggung atas kegagalan yang mungkin terjadi pada perusahaan namun dari segi perusahaan semakin besar rasio semakin menguntungkan.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang menggunakan variabel variabel yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Melawati, Nurlaela, & Wahyuningsih (2016) tentang Pengaruh *Good Corporate Governence, Corporate Social Responcibility*, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Perusahaan menunjukkan pengungkapan Ukuran Perusahaan mempunyai pengaruh pisitif kepada kinerja keuangan perusahaan yang berbeda dengan dewan komisaris, dewan direksi dan CSR yang tidak mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Mahaputeri & Yadnyana (2014) tentang Berpengaruhnya Struktur Kepemilikan, Kebijakan Pendanaan Dan Ukuran Perusahaan terhadap kinerja keuangan perusahaan mengungkapkan bahwa Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan, sebaliknya penelitian Theacini & Wisadha (2014) tentang Pengaruh *Good Corporate Governence*, Kualitas Laba dan Ukuran Perusahaan pada Kinerja Perusahaan menunjukan Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Kinerja Perusahaan selain itu penelitian tersebut juga mengungkapkan bahwa dewan direksi mempunyai pengaruh pisitif pada kinerja perusahaan.

Dalam penelian milik Dewi (2015) tentang *The Role of CSRD on Company's Financial Performance and Earnings Response Coefficient* (ERC) memiliki hasil yang sejajar dengan penelitian, Pramana & Yadnyana

(2016) juga penelitian Candrayati & Saputra (2013) yang menyatakan CSR mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan, akan tetapi penelitian Novrianti dan Riadi (2016) tentang Pengaruh *Corporate Social Responsibility* Dan *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Perusahaan, bahwa CSR tidak berpengaruh terhadap Kinerja Perusahaan, Penelitian ini juga menyatakan bahwa Dewan Direksi tidak berpengaruh terhadap Kinerja Perusahaan.

Sedangkan penelitian Maretha & Purwaningsih (2013) tentang Pengaruh Good Corporate Governance pada kinerja keuangan perusahaan, dengan menggunakan aset dan ukuran perusahaan yang dijadikan variabel untuk mengontrol yang mengungkapkan variabel dewan direksi mempunyai pengaruh pada kinerja keuangan. Penelitian Putri & Amanah (2017) tentang Pengaruh Leverage, Intelektual Capital Dan Ownership Struktur Terhadap Kinerja Keuangan menyatakan kebijakan pendanaan (*leverage*) tidak berpengaruh terhadap Kinerja keuangan, penelitian tersebut sejajar dengan penelitian (Wahyuningtyas, 2014).

C. Penurunan Hipotesis

1. Dewan Direksi terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan

Dewan direksi memegang peran yang penting dalam sebuah perusahaan. Dewan direksi memiliki peran yang berbeda dengan dewan komisaris, bahwa dewan direksi memiliki kewajiban besar untuk mengelola sumber daya yang tersedia didalam perusahaan. Tugas yang dimiliki dewan direksi adalah untuk mengambil keputusan atas rancangan sumber daya

miliki perusahaan, baik sumber daya untuk jangka pendek maupun jangka panjang.

Disebutkan dalam Undang-Undang No 33 tahun 2014 Perusahaan Publik, yang menyebutkan dimana dewan direksi mempunyai hak dalam mewakili perusahaan untuk urusan didalam maupun di luar perusahaan. Konsep keagenan dalam Dewan Direksi dijelaskan oleh Jensen & Meckling (1976) menyatakan konsep keagenan yaitu sebuah kontrak yang dimana *principal* menyewa agent untuk melakukan kontribusi bagi kepentingan mereka dengan memberikan beberapa wewenang pembuatan keputusan kepada agen. Agen disini yang dimaksud adalah Dewan Direksi. Sehingga Dewan Direksi mempunyai wewenang yang lebih dalam pengambilan keputusan untuk pengelolaan strategi sumberdaya perusahaan. Didalam sebuah perusahaan komposisi dewan direksi yang dimiliki perusahaan sangat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan dengan lebih efektif. Dengan pengambilan keputusan yang efektif maka pengelolaan sumberdaya perusahaan akan semakin baik dengan semakin baiknya pengelolaan sumberdaya perusahaan membuat kinerja keuangan perusahaan juga akan meningkat. Dari Penjelasan diatas, sudah dapat menjelaskan bahwa jumlah dewan direksi merupakan salah satu variabel GCG yang sangat penting untuk menentukan kinerja keuangan perusahaan.

Menurut penelitian Maretha & Purwaningsih (2013) bahwa hasil pengujian *Good Corporate Governance* (RUPS, D. Komisaris, D. Direksi) yang mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja keuangan sejajar dengan

penelitian Theacini & Wisadha (2014) menyatakan jumlah dewan direksi berpengaruh terhadap Kinerja keuangan Perusahaan

H1: Dewan Direksi berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan.

2. Dewan Komisaris terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan

Dewan komisaris mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan masukan kepada dewan direksi yang ada didalam perusahaan. Dewan komisaris tidak memiliki otoritas langsung kepada perusahaan. Dewan komisaris mempunyai berfungsi untuk melakukan pengawasan kelengkapan dan kualitas laporan informasi atas kinerja yang dilakukan dewan direksi. Adanya dewan komisaris sangat penting dalam perusahaan untuk menjembatani kepentingan utama dalam sebuah perusahaan. Pengawasan yang dilakukan terhadap dewan direksi akan semakin baik jika jumlah Dewan Komisaris semakin banyak, karena akan lebih banyak masukan yang akan di dapatkan oleh Dewan Direksi. Dengan begitu semakin banyak jumlah Dewan Komisaris akan semakin baik untuk perusahaan karena tata kelola dalam Perusahaan akan lebih baik pengawasannya.

Menurut Solihin (2008) menyatakan *Agency theory* dimana tata kelola perusahaan harus diawasi dan dikendalikan untuk memastikan bahwa tata kelola tersebut dilakukan dengan kepatuhan kepada peraturan dan ketentuan yang berlaku. Dalam penelitian Maretha & Purwaningsih (2013) menyatakan *Good Corporate Governance* (Dewan Komisaris) berpengaruh positif terhadap Kinerja Perusahaan.

H2: Dewan Komisaris berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan.

3. Corporate Social Responsibility terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan salah satu bentuk kesungguhan perusahaan untuk menyisihkan sebagian harta kekayaan perusahaan agar dapat mengurangi dampak negatif yang mungkin terjadi dan berupaya memaksimalkan dampak positif dari operasi perusahaan terhadap semua pihak yang berkepentingan dalam kegiatan ekonomi, sosial dan lingkungan. Dalam penelitian ini Teori legitimasi mengimplikasikan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan bertujuan untuk memperoleh pengakuan legitimasi dari masyarakat. Mengungkapkan informasi CSR adalah bentuk investasi yang dilakukan oleh perusahaan yang memiliki manfaat dapat meningkatkan image perusahaan serta legitimasi perusahaan, sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu cara perusahaan dalam meningkatkan kinerja perusahaan.

Penelitian Candrayanthi & Saputra (2013) menyatakan *Corporate Social Responsibility* berpengaruh positif terhadap ROE (Kinerja Perusahaan), Penelitian ini didukung oleh penelitian Dewi (2015) yang menyatakan CSR secara signifikan mempengaruhi ROE (Kinerja Perusahaan). Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Pramana & Yadnyana (2016) menyatakan bahwa CSR berpengaruh positif signifikan pada Kinerja Perusahaan.

H3: CSR berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan.

4. Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan hal yang penting dalam proses pelaporan keuangan. Ukuran perusahaan merupakan bukti baik tidaknya perusahaan dalam mengelola bisnisnya. Othman *et al.* (2009) menyatakan Ukuran perusahaan merupakan salah satu indikasi keberhasilan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya, semakin baik perusahaan dalam mengelola bisnisnya maka perusahaan tersebut akan mengalami pertumbuhan dalam bisnisnya. Semakin besar ukuran perusahaan, dapat dipastikan semakin besar juga dana yang dikelola dan semakin kompleks pula pengelolaannya (Melawati, Nurlaela, & Wahyuningsih, 2016). Sehingga ukuran perusahaan akan berpengaruh terhadap akses perusahaan dalam memperoleh sumber pendanaan. Perusahaan besar cenderung mendapat perhatian lebih dari masyarakat luas. Ukuran perusahaan dapat menunjukkan jumlah pengalaman dan kemampuan perusahaan dalam mengelola resiko untuk memenuhi keinginan para pemegang saham (Mahaputeri & Yadnyana, 2014). Menurut Liargovas & Skandalis (2008) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan merupakan suatu pertimbangan investasi penting bagi investor dalam membeli saham. Bagi investor, ukuran perusahaan dijadikan patokan bahwa perusahaan tersebut mempunyai kinerja yang bagus. Dengan demikian, biasanya perusahaan besar memiliki kecenderungan untuk selalu menjaga stabilitas dan kondisi perusahaan. Untuk menjaga stabilitas dan kondisi ini, perusahaan tentu saja akan berusaha mempertahankan dan terus meningkatkan kinerjanya.

Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Kinerja Perusahaan (Theacini & Wisadha, 2014) penelitian ini di dukung oleh penelitian Melawati, Nurlaela, & Wahyuningsih (2016) menyatakan Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.

H4: Ukuran Perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan.

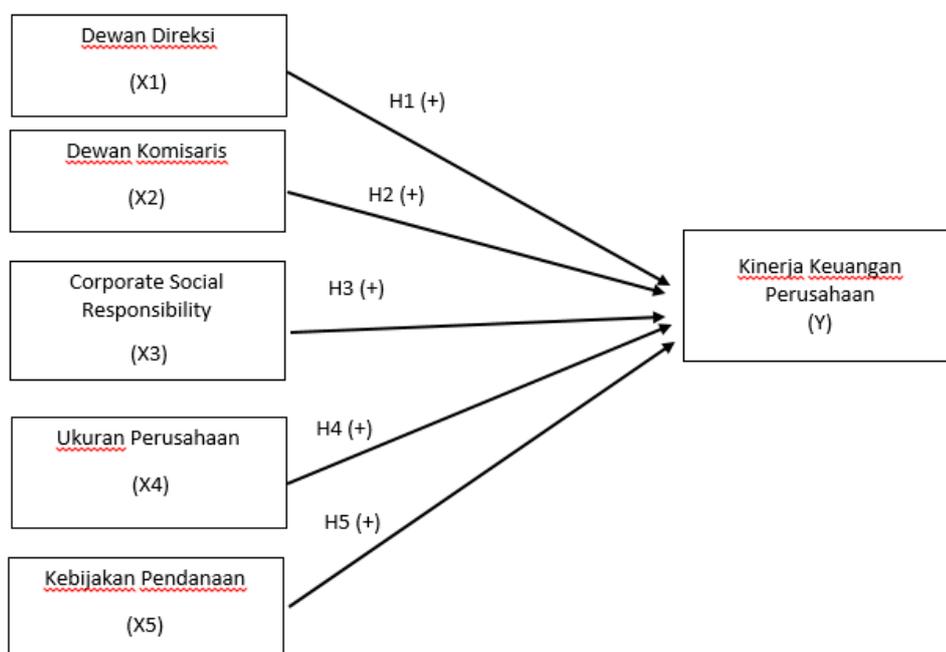
5. Kebijakan Pendanaan terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan

Dalam menjalankan usahanya, setiap perusahaan tentu memerlukan modal yang kuat untuk membiayai kegiatan-kegiatan perusahaan. Menurut sifatnya ada dua tipe pendanaan yaitu pendanaan dari dalam dan pendanaan dari luar. Pendanaan dari luar bisa berupa pinjaman, baik pinjaman jangka pendek maupun pinjaman jangka panjang, dan juga dengan menjual surat berharga (go public) kepada masyarakat melalui pasar modal (Barclay & Smith, 2005). Menurut Pendekatan Modigliani dan Miller dengan pajak dalam (Hanafi, 2013) menyatakan bahwa keuangan dalam suatu perusahaan akan meningkat apabila perusahaan menggunakan sumber pendanaan yang berasal dari utang, meningkatnya keuangan perusahaan dikarenakan adanya penghematan pajak dari penggunaan utang. Apabila semakin banyak pendapatan perusahaan maka semakin banyak pajak yang harus ditanggung perusahaan. Keputusan berhutang membuat perusahaan membuat perusahaan harus membagi pendapatannya untuk beban pajak dan bunga. Dengan demikian, perusahaan yang memiliki tingkat hutang yang tinggi lebih memilih menggunakan pendapatannya untuk membayar bunga hutang.

Berkurangnya pendapatan setelah beban bunga secara tidak langsung akan mengurangi pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Adanya aliran kas keluar untuk membayar pajak menjadi sedikit dan akan membuat profitabilitas perusahaan meningkat, meningkatnya profitabilitas perusahaan akan menarik investor untuk berinvestasi terhadap perusahaan. Banyaknya investor yang tertarik untuk berinvestasi terhadap perusahaan akan berdampak pada meningkatnya kinerja keuangan perusahaan

Penelitian ini sejajar dengan penelitian (Detthamrong, Chancharat, & Vithessonthi, 2017) dan (Mahaputeri & Yadnyana, 2014) bahwa kebijakan pendanaan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan dalam perusahaan
H5: Kebijakan Pendanaan berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan

D. Model Penelitian



Gambar 2 1 Metode penelitian

Tabel 2. 1 Penelitian terdahulu yang mendukung

	Hipotesis			Hasil Penelitian Mendukung
H ₁	DD	$\xrightarrow{+}$	KKP	Theacini & Wisadha (2014), Melawati, Nurlaela, & Wahyuningsih (2016), Zhou, Ansah, & Anastasia (2018)
H ₂	DK	$\xrightarrow{+}$	KKP	Maretha & Purwaningsih (2013), Melawati, Nurlaela, & Wahyuningsih (2016)
H ₃	CSR	$\xrightarrow{+}$	KKP	Pramana & Yadnyana (2016), Candrayanthi & Saputra (2013), Kao, Yeh, Wang, & Fung, (2018)
H ₄	UK	$\xrightarrow{+}$	KKP	Melawati, Nurlaela, & Wahyuningsih (2016), Theacini & Wisadha (2014)
H ₅	KP	$\xrightarrow{+}$	KKP	Detthamrong, Chancharat, & Vithessonthi (2017) dan Mahaputeri & Yadnyana (2014)